

Reforma Agraria: Tantangan dan Peluang

Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Program reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo membuahkan hasil. Indikatornya, pendaftaran bidang tanah mengalami lompatan 250 persen tujuh tahun terakhir.

Pada 2017, tanah terdaftar baru 46 juta bidang. Pada Mei 2024, yang terdaftar 112 juta bidang tanah. Bank Dunia mengapresiasi pencapaian ini. Pada World Bank Land Conference 2024, di markas Bank Dunia, Washington DC, Senin (13/5/2024), Indonesia diminta berbagi kunci sukses.

Mewakili Asia, di hadapan lebih dari 1.400 peserta dari 81 negara, Indonesia tak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga tantangan dan peluang ke depan. Ini mendapatkan respons positif. Beberapa negara mengajak kerja sama bilateral untuk mengimplementasikan solusinya.

Tantangan dan solusi

Tiga kunci sukses pendaftaran tanah di Indonesia bersumber pada tiga hal. Pertama, kepemimpinan dan manajemen hingga kepala desa. Kedua, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, parlemen, swasta, dan masyarakat. Ketiga, adaptasi yang tinggi terhadap tantangan masa depan.

Tantangan terbesar reforma agraria (RA) tak hanya sekadar mendaftarkan dan membagikan tanah, tetapi bagaimana aset tanah yang dimiliki rakyat bisa memiliki nilai ekonomi yang menggerakkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

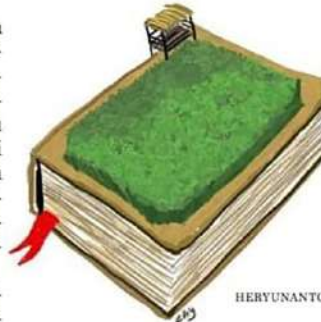
Harapannya, RA bukan hanya menghadirkan keadilan, melainkan juga kesejahteraan, sekaligus mengatur dan menjaga kelestarian lingkungannya. Perlu kerja bersama seluruh elemen di pemerintahan. Kementerian ATR/BPN mengambil peran dengan menyusun langkah-langkah sistematis melalui optimalisasi transformasi digital.

Pertama, mendorong hilirisasi data dan informasi pertanahan serta tata ruang, yang bisa diakses secara luas oleh publik. Ke depan, transformasi digital tak hanya berhenti di program sertifikat elektronik, tetapi harus mampu menyediakan informasi lain yang bersifat ekonomis.

Informasi itu antara lain; keamanan kepemilikan hak atas tanah (*land tenure security*), nilai tanah (*land value*), penggunaan tanah (*land use*), perizinan tanah (*land development*), dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha bisa memiliki informasi yang setara untuk bertransaksi dan berinvestasi. Informasi tidak hanya dikooptasi pihak tertentu.

Kedua, menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan hilirisasi data. Sistem data terpadu diperkaya dengan basis informasi penunjang, seperti keterangan demografi, mobilitas warga, potensi agrikultur, rata-rata kemampuan finansial warga, dan perilaku pasar di sekitarnya. Data dan informasi itu bisa menjadi basis penilaian potensi lahan yang dibutuhkan dunia usaha; dari perbankan, pengembang properti, hingga penyedia pinjaman modal UMKM.

Juga, akan dipahami model dan skema bisnis yang tepat untuk dikembangkan di wilayah tertentu. Tak boleh lagi ada lahan menganggur. Semua diproduktifkan. Bukan hanya masyarakatnya yang bekerja, melainkan lahannya juga bekerja sehingga keuntungan bukan hanya didapatkan penggarap, melainkan juga pemilik la-



HERYUNANTO

han; dengan sistem bagi hasil, misalnya.

Ketiga, melakukan perencanaan tata ruang wilayah secara berkelanjutan melalui pengembangan program tiga dimensi (3D). Bank Dunia memperkirakan 7 dari 10 orang di dunia akan tinggal di perkotaan. Hunian dan tempat kerja sudah tak lagi berorientasi tanah tapak (*landed*), tetapi semakin memanfaatkan ruang udara dalam bentuk gedung tinggi atau bangunan bertingkat.

Karena itu, data pertanahan dan tata ruang yang kini mayoritas masih dua dimensi (2D) harus ditingkatkan menjadi 3D, terutama di perkotaan. Data 3D akan membantu secara proporsional dalam mendistribusikan alokasi lahan dan ruang untuk fungsi hunian, komersial, transportasi, ruang terbuka hijau, penataan saluran air, termasuk memetakan risiko kebencanaan.

Keempat, melakukan antisipasi perubahan iklim dengan pemanfaatan kecerdasan buatan. (AI). Dengan bantuan AI, yang diperkaya informasi tematik terkait tutupan lahan berupa jenis vegetasi dan potensi budidaya di lingkungan sekitar, kita bisa memprediksi dan mengalkulasikan secara lebih akurat berapa ton kapasitas *carbon capture* per hektar.

Revisi PP No 18/2021 terkait *carbon trading* akan membuka kesempatan bagi publik dan swasta terlibat dalam program pengurangan emisi karbon gu-

na menyelamatkan bumi dan lingkungan kita.

Peluang Indonesia

Jika transformasi digital pada program RA berhasil dijalankan, peluang berinvestasi di Indonesia akan semakin besar; termasuk investasi asing. Peluang meraih keberhasilan itu ada. Parameternya, selain dukungan regulasi dan anggaran yang cukup, potensi SDM yang akan melakukan transformasi digital ini pun memadai.

Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur ATR/BPN menjadi mutlak. Kementerian ATR/BPN sendiri berencana memberikan beasiswa lebih banyak kepada pegawainya melalui kerja sama dengan pihak lain; khususnya sekolah pada jurusan *science, technology, engineering, and math* (STEM).

Selain itu, sosialisasi masif kepada masyarakat tentang transformasi digital juga menjadi salah satu kunci sukses. Bentuknya bisa berbagai macam, yang penting kreatif dan inovatif.

Belajar dari Belanda, Kepala Kadaster (BPN) Belanda Frank Tierolf menuturkan, Pemerintah Belanda sampai harus membuat program *reality show* di televisi, yang menceritakan masalah sengketa tanah dan problematika tata ruang sebagai bentuk sosialisasi publik. Program itu dinilai efektif untuk meningkatkan literasi publik. Bahkan banyak warga terinspirasi dan menjadikan penjelasan di program itu yurisprudensi dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan miliknya.

Melalui kolaborasi SDM aparatur agraria yang kompeten dan partisipasi masyarakat yang tinggi, transformasi digital akan lebih mudah dijalankan. Jika ini sukses, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat atas pengelolaan lahan, tujuan RA untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.